

	Tujuan	:	Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern			
	Indikator Tujuan	:	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI			
1	1 Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi			TERSELENGGARANYA DUKUI
	Indikator Sasaran Strategis	:	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang	86	%	
	Sasaran Program	:	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi			
	Indikator Kinerja Program	:	Rasio total draft hasil Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang yang	82	%	
	Program	:	Program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan			
	Sasaran Kegiatan	:	1 Terselenggaranya dukungan legislasi lingkup Biro Persidangan I			
	Kegiatan	:	a Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD			
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft rancangan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I	92	%	
		:	- Rasio draft hasil Pandangan pendapat serta pertimbangan yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft rancangan Undang-Undang dan pandangan serta pertimbangan yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I	92	%	
	Rincian Output	:	1) Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya Penyusunan Pandangan dan Pendapat/Pertimbangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tertentu (Lingkup Komite III)	1		Materi
	Indikator Rincian Output		2) UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya Kegiatan UU Hasil Pemantauan Dan Peninjauan DPD RI	2		Materi
	Indikator Rincian Output		3) Konsep RUU			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya kegiatan Konsepsi RUU DPD	1		RUU
	Indikator Rincian Output		4) RUU usul tugas panitia perancang undang-undang DPD RI			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya Kegiatan RUU Usul DPD RI (PPUU)	1		RUU
	Indikator Rincian Output		5) Usul prolegnas DPD RI			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya kegiatan Prolegnas Usul DPD	1		Materi
	Indikator Rincian Output		6) RUU usul tugas Komite III DPD RI			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya Penyusunan Rancangan UndangUndang Usul dari Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2021 Lingkup Tugas Komite III	1		RUU
	Indikator Rincian Output		7) Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite I)			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya kegiatan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU tertentu yang Berkaitan dengan Ruang Lingkup Tugas Komite I DPD RI.	1		RUU
	Indikator Rincian Output		8) RUU usul tugas Komite I			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Ruang Lingkup Tugas	1		RUU
	Indikator Rincian Output		9) Harmonisasi legislasi pusat-daerah			
	Indikator Rincian Output		Tersusunnya Pendapat dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah	1		Rekomendasi Kebijakan
	Indikator Rincian Output		10) RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (pemerintah)			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya Pembahasan Bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Biro Persidangan I	1		Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	:	2 Terselenggaranya dukungan legislasi lingkup Biro Persidangan II			
	Kegiatan	:	a Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh			
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Rasio total draft hasil Rancangan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft rancangan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II	81	%	
		:	- Rasio total draft hasil pandangan pendapat serta pertimbangan yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft pandangan pendapat serta pertimbangan yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II	81	%	
	Rincian Output	:	1) RUU usul tugas Komite II DPD RI			
	Indikator Rincian Output		Tersusunnya Usul Rancangan Undang-Undang DPD RI (Komite II)	2		RUU
	Indikator Rincian Output		2) Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite II)			
	Indikator Rincian Output		Penyusunan Hasil Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang	2		RUU
	Indikator Rincian Output		3) RUU usul tugas komite IV DPD RI			
	Indikator Rincian Output		Jumlah RUU Usul Tugas Komite IV DPD RI	2		RUU
	Indikator Rincian Output		4) RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)			
	Indikator Rincian Output		Terselenggaranya Kegiatan RUU Tertentu Hasil Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	1		RUU
2	2 Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI			
	Indikator Sasaran Strategis	:	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft			
		:	hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan			
	Sasaran Program	:	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD			
	Program	:	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan			
	Indikator Kinerja Program	:	Rasio total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan	84	%	
	Sasaran Kegiatan	:	1 Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan I			

Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	86	%
		-	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang Undang lingkup Biro Persidangan I yang disusun di lingkup Biro Persidangan lterhadap draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I	87	%
Rincian Output	:	1)	Inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan		
Indikator Rincian Output	:				
		2)	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite I)		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya kegiatan penyusunan Pengawasan DPD RI atas RUU tertentu yang Berkaitan dengan Ruang Lingkup Tugas Komite I DPD RI.	4	UU
		3)	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Penyusunan Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu (Lingkup Komite III)	3	RUU
		4)	kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite I		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Advokasi dan Resolusi Permasalahan Daerah (Komite I)	1	Rekomendasi Kebijakan
		5)	Kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite III		
Indikator Rincian Output			Jumlah rekomendasi kepada Mitra Kerja lingkup tugas komite III	1	Rekomendasi Kebijakan
Sasaran Kegiatan	:	2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan undang undang lingkup Biro Persidangan II		
Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Rasio total draft Hasil Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II	81	%
Rincian Output	:	1)	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II)		
Indikator Rincian Output	:		Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Tertentu (Komite II)	5	UU
		2)	Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Kegiatan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu Bidang Komite IV	5	UU
3		3	Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya
Indikator Sasaran Strategis	:		Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft	72	%
			Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil	82	%
Sasaran Program	:		Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya		
Program	:		Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		
Indikator Kinerja Program	:		Rasio total draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan terhadap total draft pertimbangan dan	85	%
Sasaran Kegiatan	:	1	Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan II		
Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Rasio total draft hasil Pertimbangan anggaran DPD RI yang disusun terhadap Total Draft hasil Pertimbangan Anggaran yang direncanakan	67	%
		-	Rasio total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi DPD RI yang disusun terhadap total Draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendas yang direncanakan di Lingkup Biro Persidangan II	77	%
Rincian Output	:	1)	Pandangan/Pendapat Dan Pertimbangan DPD RI Atas RUU Tertentu Bidang Komite IV		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Kegiatan Pandangan/Pendapat Dan Pertimbangan DPD RI Atas RUU Tertentu Bidang Komite IV	5	UU
		2)	Hasil Pertimbangan DPD RI Atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Kegiatan Hasil Pertimbangan Dpd Ri Atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	2	IHPS
		3)	Pertimbangan DPD RI Atas Calon Anggota BPK		
Indikator Rincian Output			Terlaksananya Kegiatan Pertimbangan DPD RI atas Calon Anggota BPK	1	Materi
		4)	Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)		
Indikator Rincian Output			Tersusunnya Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga	4	Rekomendasi
		5)	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Rincian Output			JUMLAH REKOMENDASI ATAS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI YANG BERINDIKASI KERUGIAN	2	Materi
		6)	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Permasalahan Yang Disampaikan Pemda		
Indikator Rincian Output			JUMLAH REKOMENDASI ATAS TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN PEMDA	2	Materi
		7)	Kebijakan Non RUU/UU Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan		
Indikator Rincian Output			Tersusun dan terlaksananya peraturan tata tertib/kode etik/tata beracara BK	2	Materi
		8)	Sidang Paripurna/Panmus/Pansus DPD Ri		
Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Tugas Sidang Paripurna/Panmus/Pansus DPD RI	4	Rekomendasi
Sasaran Kegiatan	:	2	Terselenggaranya dukungan produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan I		
Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD		
Rincian Output	:	1)	LABORATORIUM KONSTITUSI KELOMPOK DPD		
Indikator Rincian Output	:				
		2)	PENYERAPAN ASPIRASI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UUD NRI TAHUN 1945		

	Indikator Rincian Output				
	Indikator Rincian Output	3)	MONITORING TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA Tersusunnya Database Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda serta Persidangan BULD	1	Rekomendasi
	Indikator Rincian Output	4)	PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN ATAS PERMINTAAN DAERAH TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH Tersusunnya Revisi Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Anggota DPD.	1	Rekomendasi
	Indikator Rincian Output	5)	PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN DAERAH Tersusunnya Rekomendasi Rancangan Perda dan Perda pedoman bagi Anggota DPD	2	Rekomendasi
4	4 Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah		
	Indikator Sasaran Strategis	:	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total	88	%
	Sasaran Program	:	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan Program		
	Indikator Kinerja Program	:	Rasio total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data yang dihasilkan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan	80	%
	Sasaran Kegiatan	:	1 Meningkatkan pemanfaatan penelitian dan kajian aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	a Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah		
		:	- Rasio hasil penelitian dan kajian yang disusun terhadap total penelitian dan kajian yang direncanakan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	90	%
	Rincian Output	:	1) ANALISIS APBN		
	Indikator Rincian Output	:	Hasil Kajian APBN	5	Materi
	Indikator Rincian Output	:	2) ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN LEGISLATIF BIDANG KOMITE IV		
	Indikator Rincian Output	:	3) ANALISIS TERHADAP ISU STRATEGIS KEDAERAHAN Tersusunnya hasil penelitian/Kajian isu strategis Kedaerahan	3	Rekomendasi
	Sasaran Kegiatan	:	2 Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI		
	Kegiatan	:	a Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum		
	Rincian Output	:	1) KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM Terlaksananya dukungan pengkajian hukum dan kebijakan	2	Rekomendasi
	Indikator Rincian Output	:	2) RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN HUKUM Terlaksananya dukungan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Analisis hukum dan kebijakan	4	Rekomendasi
5	5 Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal		
	Indikator Sasaran Strategis	:	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil	88	%
	Sasaran Program	:	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal		
	Program	:	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		
	Indikator Kinerja Program	:	Rasio total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang dihasilkan terhadap total pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah	75	%
	Sasaran Kegiatan	:	1 Terselenggaranya Dukungan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Optimal		
	Kegiatan	:	a Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang disusun oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang direncanakan	97	%
	Rincian Output	:	1) TABULASI HASIL PENGOLAHAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH Tabulasi hasil pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	5	Materi
	Indikator Rincian Output	:	2) DUKUNGAN SUBSTANSI TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI ALAT KELENGKAPAN Terselenggaranya Kegiatan Seminar Nasional	5	Materi
6	6 Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI		
	Indikator Sasaran Strategis	:	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3.6	Skala Likert 1-4
	Sasaran Program	:	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI		
	Program	:	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		
	Indikator Kinerja Program	:	Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI dan alat Kelengkapan atas layanan deputi persidangan	3.3	Skala Likert 1-4
	Sasaran Kegiatan	:	1 Meningkatkan kepuasan anggota DPD dalam alat kelengkapan terhadap layanan persidangan Biro Persidangan II		
	Kegiatan	:	a Penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat Kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelenkapan terhadap layanan Biro Persidangan II	3	Skala Likert 1-4
	Rincian Output	:	1) PENDAMPINGAN MITRA KERJA KOMITE IV Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil pendampingan mitra kerja lingkup Komite IV	8	Materi
	Indikator Rincian Output	:	2) ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH OLEH ANGGOTA DPD RI Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	35	Layanan
	Indikator Rincian Output	:	2 Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran		
	Sasaran Kegiatan	:	a Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah		

	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	3.5	Skala Likert 1-4
	Rincian Output	:	1)	DUKUNGAN DATA DAN MATERI TERKAIT KEWENANGAN KOMITE		
	Indikator Rincian Output			Tersedianya Data dan Materi Terkait Kewenangan Komite sebagai dukungan substantif bagi fungsi DPD RI, khususnya dalam hal legislasi dan pengawasan.	10	Materi
	Sasaran Kegiatan	:	3	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Biro Sekretariat Pimpinan		
	Kegiatan	:	a	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat Kepuasan Pimpinan DPD RI Terhadap Layanan Biro Sekretariat Pimpinan	3.4	Skala Likert 1-4
	Rincian Output	:	1)	Pemasyarakatan Keputusan DPD R		
	Indikator Rincian Output			Jumlah kegiatan Pemasyarakatan Putusan DPD RI	2	Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	:	4	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Persidangan Biro Persidangan I		
	Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan I	3.4	Skala Likert 1-4
	Rincian Output	:	1)	KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN LEMBAGA INTERNASIONAL		
	Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Kegiatan Kerja Sama Antar Parlemen dengan Parlemen Negara Sahabat	3	Kesepakatan
	Sasaran Kegiatan	:	5	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum		
	Kegiatan	:	a	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	3.27	Skala Likert 1-4
	Rincian Output	:	1)	LAPORAN KINERJA LEMBAGA DPD RI DAN LAPORAN SEKRETARIAT JENDERAL		
	Indikator Rincian Output			Tersusunnya Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat	1	Dokumen
				DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI INFORMASI HUKUM		
	Indikator Rincian Output			Layanan Dokumen Publikasi Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPD R	1	Layanan
				LAYANAN JARINGAN INFORMASI HUKUM		
	Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Pelaksanaan Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) pada Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	1	
						Layanan
7	7	Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien		
	Indikator Sasaran Strategis	:		Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100	%
	Sasaran Program	:		Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan		
	Program	:		Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		
	Indikator Kinerja Program	:		Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat DPD RI	100	%
	Sasaran Kegiatan	:	1	Terselenggaranya Dukungan Persidangan DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan		
	Kegiatan	:	a	Pengelolaan kesekretariatan Pimpinan DPD		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Dukungan Sidang dan Rapat di Lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	100	%
	Rincian Output	:	1)	Pertemuan/Konsultasi		
	Indikator Rincian Output			Jumlah kegiatan pertemuan dan konsultasi DPD RI dengan Lembaga Negara Lainnya/Pemda/Praktisi	4	Layanan
	Sasaran Kegiatan	:	2	Terselenggaranya Dukungan Sidang dan Rapat DPD RI yang Efektif di Lingkup Biro Persidangan II		
	Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat kepuasan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan II	100	%
	Rincian Output	:	1)	PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN II		
	Indikator Rincian Output			Terselenggaranya Kegiatan Persidangan Dan Materi Dalam Lingkup Biro Persidangan II	2	Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	:	3	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Persidangan I		
	Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan I	100	%
	Rincian Output	:	1)	PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I		
	Indikator Rincian Output			Tersedianya Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan I	2	Kegiatan
8	8	Sasaran Strategis	:	Terbentuknya citra positif DPD RI		
	Indikator Sasaran Strategis	:		Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	8	%
	Sasaran Program	:		Terbentuknya Citra Positif DPD RI		
	Program	:		Program Dukungan Manajemen		
	Indikator Kinerja Program	:		Rasio Pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	9	%
	Sasaran Kegiatan	:	1	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI		
	Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media		
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Nilai Peningkatan Kualiatas Layanan Publik	3.2	Nilai
	Rincian Output	:	1)	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		
	Indikator Rincian Output			Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan
9	9	Sasaran Strategis	:	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI		
	Indikator Sasaran Strategis	:		Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	36	Nilai

Sasaran Program	:	Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi.		
Program	:	Program Dukungan Manajemen		
Indikator Kinerja Program	:	Indeks Kepuasan Pengguna Atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3.7	Skala Lickert
Sasaran Kegiatan	:	1 Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi		
Kegiatan	:	a Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi	4	Skala Lickert
Rincian Output	:	1) PENGADAAN JARINGAN		
Indikator Rincian Output		jumlah pengadaan jaringan	18	Unit
Rincian Output		2) Layanan Perkantoran		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Perkantoran operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi	1	Layanan
Sasaran Kegiatan	:	2 Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Administrasi		
Kegiatan	:	a Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	3.34	Skala Lickert
Rincian Output	:	1) EVALUASI DAN MONITORING TERKAIT PERATURAN/KEPUTUSAN SETJEN DI KANTOR DAERAH		
Indikator Rincian Output			1	Layanan
Indikator Rincian Output		2) Layanan Bantuan Hukum		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Peraturan/Keputusan Sekretariat Jenderal DPD RI)	1	Layanan
Indikator Rincian Output		3) Layanan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Rincian Output		Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	320	Orang
Indikator Rincian Output		4) Layanan Pendidikan Kedinasan		
Indikator Rincian Output		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan Kedinasan	9	Orang
Indikator Rincian Output		5) Layanan Manajemen SDM		
Indikator Rincian Output		Jumlah Anggota dan Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi	2036	Orang
Sasaran Kegiatan	:	3 Terselenggaranya layanan hak keuangan administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI serta hak keuangan staf keahlian dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI dan operasional persida		
Kegiatan	:	a Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Realisasi Pembayaran Gaji Anggota DPD RI dan Hak keuangan staf ahli dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI	100	%
	:	- Realisasi Layanan Operasional Persidangan dan Rapat-Rapat	100	%
Rincian Output	:	1) Layanan Perkantoran		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan hak keuangan administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI serta hak keuangan staf keahlian dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI dan operasional persidangan dan rapat-rapat	1	Layanan
Sasaran Kegiatan	:	4 Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan		
Kegiatan	:	a Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3.6	Skala Lickert
Rincian Output	:	1) Layanan Perkantoran		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Operasional Gaji dan Operasional Perkantoran	1	Layanan
Sasaran Kegiatan	:	5 Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Kantor DPD RI Provinsi		
Kegiatan	:	a Penyelenggaraan Dukungan Teknis Administratif, dan Keahlian di Kantor DPD RI di Daerah Pemilihan (Ibukota Provinsi)		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan atas layanan Kantor DPD RI Provinsi	3.6	Skala Lickert
Rincian Output	:	1) Layanan Perkantoran		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
Indikator Rincian Output		2) Layanan Umum		
Indikator Rincian Output		Jumlah Dukungan Teknis Kegiatan Anggota Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat Daerah	1	Layanan
Indikator Rincian Output		3) Layanan Sarana Internal		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan sarana Internal di Kantor DPD RI di ibukota provinsi	355	Unit
Sasaran Kegiatan	:	6 Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol Hubungan masyarakat dan media		
Kegiatan	:	a Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	3.4	Skala Lickert
Rincian Output	:	1) Layanan Protokoler		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Lembaga	1	Layanan
Sasaran Kegiatan	:	7 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Internal Biro Umum		
Kegiatan	:	a Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	- Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Umum	3.6	Skala Lickert
Rincian Output	:	1) Layanan Perkantoran		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
Indikator Rincian Output		2) Layanan Umum		
Indikator Rincian Output		Jumlah Layanan Umum	1	Layanan
Indikator Rincian Output		3) Layanan Prasarana Internal		
Indikator Rincian Output		Jumlah Prasarana	8	Unit
Indikator Rincian Output		4) Layanan Sarana Internal		
Indikator Rincian Output		Jumlah Sarana Internal	211	Unit

Sasaran Kegiatan	:	8	Terlaksananya audit internal yang professional, akuntabel dan Kompeten		
Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Indeks Kepuasan Pengguna Atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	3	Skala Lickert
Rincian Output	:	1)	Layanan Audit Internal		
Indikator Rincian Output	:		Nilai Persepsi Korupsi	1	Nilai
Sasaran Program	:		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi		
Program	:		Program Dukungan Manajemen		
Indikator Kinerja Program	:		Nilai Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi lingkup Deputi Bidang Administrasi	17	
	:		Nilai Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN lingkup Deputi Administrasi	9.7	
	:		Nilai kualitas layanan publik Setjen DPD RI	9	
Sasaran Kegiatan	:	1	Terselenggaranya Pengelolaan BMN yang Sesuai Standar		
Kegiatan	:	a	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Terselenggaranya pengelolaan BMN yang sesuai standar.	54	%
Rincian Output	:	1)	Layanan BMN		
Indikator Rincian Output	:		Jumlah Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Yang Sesuai Standar	1	Layanan
Sasaran Kegiatan	:	2	Terwujudnya Pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Setjen DPD RI		
Kegiatan	:	a	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal	77	Nilai AKIP
Rincian Output	:	1)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
Indikator Rincian Output	:		Jumlah Dokumen RKA-KL DPD RI	2	Dokumen
Sasaran Kegiatan	:	3	Meningkatnya pelaksanaan kriteria hasil reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI		
Kegiatan	:	a	Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Nilai kapasitas organisasi (Survei internal)	77	Skala Lickert
Rincian Output	:	1)	SURVEI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI		
Indikator Rincian Output	:			2	Dokumen
Sasaran Kegiatan	:	4	Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Sejten DPD RI yang akuntabel		
Kegiatan	:	a	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI	WTP	Opini BPK
Rincian Output	:	1)	Layanan Manajemen Keuangan		
Indikator Rincian Output	:		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen
10	10	Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI	
Indikator Sasaran Strategis	:		Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	40	Nilai
Sasaran Program	:		Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Administrasi		
Program	:		Program Dukungan Manajemen		
Indikator Kinerja Program	:		Nilai manajemen perubahan	3.5	Nilai kriteria pengungkit RB
	:		Nilai penataan peraturan perundang undangan	3.38	Nilai kriteria pengungkit RB
	:		Nilai Penataan dan penguatan organisasi	4.3	Nilai kriteria pengungkit RB
	:		Nilai Penataan Tata laksana	3.07	Nilai kriteria pengungkit RB
	:		Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM	10.55	Nilai kriteria pengungkit RB
Sasaran Kegiatan	:	1	Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan berbasis TIK		
Kegiatan	:	a	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.5	Indeks
Rincian Output	:	1)	Pengadaan Software		
Indikator Rincian Output	:			3	Dokumen
	:	2)	Layanan Data dan Informasi		
Indikator Rincian Output	:		Jumlah Layanan Data dan Informasi	4	Layanan
Sasaran Kegiatan	:	2	Meningkatnya pelaksanaan kriteria pengungkit reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI		
Kegiatan	:	a	Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Nilai penataan sistem manajemen SDM	10.55	Nilai
	:		Nilai Manajemen Perubahan	3.5	Nilai
	:		Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	4.3	Nilai
	:		Nilai penataan peraturan perundang-undangan	3.38	Nilai
	:		Nilai Penataan tatalaksana	3.07	Nilai
Rincian Output	:	1)	STANDAR PELAYANAN		
Indikator Rincian Output	:			4	Layanan
	:	2)	SOP MIKRO SETJEN DPD RI		
Indikator Rincian Output	:			3	Dokumen
Sasaran Kegiatan	:	3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan DPD RI		
Kegiatan	:	a	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi		

	Indikator Kinerja Kegiatan	:	-	Nilai Hasil Audit Kearsipan	76	Nilai
	Rincian Output	:	1)	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		
	Indikator Rincian Output			Jumlah Kegiatan Layanan Kearsipan	1	Dokumen
11	11 Sasaran Strategis	:		Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI		
	Indikator Sasaran Strategis	:		Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	87	%
	Sasaran Program	:		Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Deputi Bidang Administrasi		
	Program	:		Program Dukungan Manajemen		
	Indikator Kinerja Program	:		Rasio Rencana aksi RB lingkup Deputi Administrasi yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Deputi Administrasi	100	%
	Sasaran Kegiatan	:	1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian		
	Kegiatan	:	a	Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum		
	Indikator Kinerja Kegiatan		-	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian	95	Nilai
	Rincian Output	:	1)	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		
	Indikator Rincian Output			Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal	1	Layanan
	Indikator Rincian Output		2)	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		Layanan
	Sasaran Kegiatan	:	2	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan		
	Kegiatan	:	a	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI		
	Indikator Kinerja Kegiatan		-	Rasio Rencana Aksi RB lingkup biro Perencanaan dan Keuangan yang Terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan.	100	Nilai
	Rincian Output	:	1)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
	Indikator Rincian Output			Jumlah dokumen pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran	4	Dokumen
	,					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI	SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN			RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA			
						NAMA PROGRAM	URAIAN SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN	URAIAN SASARAN KEGIATAN					
1	2					3	4	5	6	7	8	9			
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	88	100	113.64	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Biro Persidangan I	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	Terselenggaranya dukungan legislasi lingkup Biro Persidangan I	Hasil penyusunan pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu	Terselenggaranya penyusunan pandangan dan pendapat/ pertimbangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang tertentu (lingkup Komite III)			
											UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI	Terselenggaranya kegiatan UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI			
											Konsep RUU	Terselenggaranya kegiatan konsepsi RUU DPD			
											RUU usul tugas panitia perancang undang-undang DPD RI	Terselenggaranya kegiatan RUU usul DPD RI (PPUU)			
											Usul prolegnas DPD RI	Terselenggaranya kegiatan prolegnas usul DPD			
											RUU usul tugas Komite III DPD RI	Terselenggaranya penyusunan rancangan undang usul dari Dewan Perwakilan Daerah lingkup tugas Komite III			
											Hasil penyusunan pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite I)	Terselenggaranya kegiatan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komite I DPD RI.			
											RUU usul tugas Komite I	Terselenggaranya kegiatan penyusunan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komite I.			
											Harmonisasi legislasi pusat-daerah	Tersusunnya pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah			
											RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (pemerintah)	Terselenggaranya pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Biro persidangan I			
								Biro Persidangan II	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	Terselenggaranya dukungan legislasi lingkup Biro Persidangan II	RUU usul tugas Komite II DPD RI	Tersusunnya usul rancangan undang-undang DPD RI (Komite II)			
											Hasil penyusunan pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite II)	Penyusunan hasil pandangan dan pendapat DPD RI terhadap rancangan undang-undang			
											RUU usul tugas Komite IV DPD RI	Jumlah RUU usul tugas Komite IV DPD RI			
											RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (pemerintah)	Terselenggaranya kegiatan ruu tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)			
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	88	100	113.64	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD	Biro Persidangan I	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan I	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite I)	Terselenggaranya kegiatan penyusunan pengawasan DPD RI atas RUU tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komite I DPD RI.			
											Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu	Terselenggaranya penyusunan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu (lingkup Komite III)			
											Kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite I	Terselenggaranya advokasi dan resolusi permasalahan daerah (Komite I)			
											Kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite III	Jumlah rekomendasi kepada mitra kerja lingkup tugas Komite III			
								Biro Persidangan II	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan undang undang lingkup Biro Persidangan II	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II)	Penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II)			
											Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan uu tertentu bidang Komite IV	Terselenggaranya kegiatan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV			
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	74	100	135.14	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya	Biro Persidangan II	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan II	Pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV	Terselenggaranya kegiatan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV			
											Hasil pertimbangan DPD RI atas hasil pemeriksaan keuangan negara	Terselenggaranya kegiatan hasil pertimbangan DPD RI atas hasil pemeriksaan keuangan negara			
											Pertimbangan DPD RI atas calon anggota BPK	Terlaksananya kegiatan pertimbangan DPD RI atas calon anggota BPK			
											Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)	Tersusunnya kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga			
											Rekomendasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/ daerah	Jumlah rekomendasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/ daerah			
											Rekomendasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan pemda	Jumlah rekomendasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan pemda			
											Kebijakan non RUU/ UU pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan	Tersusun dan terlaksananya peraturan tata tertib/ kode etik/ tata beracara BK			
											Sidang Paripurna/ Panmus/ Pansus DPD RI	Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan tugas sidang paripurna/ panmus/ pansus DPD RI			
		Biro Persidangan I	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	Terselenggaranya dukungan produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan I	Monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda			Tersusunnya database pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda serta persidangan BULD							
					Pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah			Tersusunnya revisi pedoman pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang menjadi pedoman bagi anggota DPD.							
					Pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan daerah			Tersusunnya rekomendasi rancangan perda dan perda pedoman bagi anggota DPD							
					Analisis APBN			Hasil kajian APBN							
4	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	89	100	112.36	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan	Pusat Kajian Kebijakan Daerah dan Anggaran	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan kajian aspirasi masyarakat dan daerah serta	Analisis terhadap isu strategis kedaerahan	Tersusunnya hasil penelitian/ kajian isu strategis kedaerahan			
											Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan dan Hukum	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI	kebijakan dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan pengkajian hukum dan kebijakan
											Rancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum	Terlaksananya dukungan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan analisis hukum dan kebijakan			
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	89	100	112.36	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal	Pusat Kajian Kebijakan Daerah dan Anggaran	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	Terselenggaranya Dukungan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Optimal	Tabulasi hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah	Tabulasi hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah			
											Dukungan substansi terhadap tugas dan fungsi alat kelengkapan	Terselenggaranya kegiatan seminar nasional			
6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3.7	3.8	102.70	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI	Biro Persidangan II	Penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI	Meningkatnya kepuasan anggota DPD dalam alat kelengkapan terhadap layanan persidangan Biro Persidangan II	Pendampingan mitra kerja Komite II	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil pendampingan mitra kerja lingkup Komite II			
											Pendampingan mitra kerja Komite IV	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil pendampingan mitra kerja lingkup Komite IV			
											Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI	Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah			

[illegible]

SATUAN RO	TVRO RENJA KL	TVRO SETELAH REKONSILIASI	RVRO SETELAH REKONSILIASI	Pagu	TW I		TW II		TW III		TW IV	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	10											
Materi	1	1	1	15,300,000	0	0.00 %	0	0.00 %	15,300,000	100.00 %	15,300,000	100.00 %
Materi	2	2	2	1,859,243,000	567,902,794	30.54 %	567,902,794	30.54 %	1,431,354,794	76.99 %	1,805,311,294	97.10 %
RUU	1	1	1	47,340,000	0	0.00 %	46,884,000	99.04 %	47,338,550	100.00 %	47,338,550	100.00 %
RUU	1	1	1	8,707,656,000	980,883,000	11.26 %	6,780,351,189	77.87 %	7,033,652,989	80.78 %	8,657,402,989	99.42 %
Materi	1	1	1	1,274,113,000	809,861,000	63.56 %	1,271,160,660	99.77 %	1,274,111,980	100.00 %	1,274,111,980	100.00 %
RUU	1	1	1	8,859,822,000	7,348,352,731	82.94 %	8,606,180,731	97.14 %	8,854,719,958	99.94 %	8,859,819,958	100.00 %
RUU	1	4	4	11,140,992,000	1,871,681,940	16.80 %	4,648,808,151	41.73 %	7,397,526,546	66.40 %	11,032,062,120	99.02 %
RUU	1	1	1	11,565,125,000	4,086,956,981	35.34 %	11,421,528,238	98.76 %	11,565,118,788	100.00 %	11,565,118,788	100.00 %
Rekomendasi	1	1	1	217,832,000	0	0.00 %	0	0.00 %	158,381,800	72.71 %	213,331,800	97.93 %
Kegiatan	1	3	3	1,100,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
RUU	2	2	1	11,186,078,000	9,667,808,289	86.43 %	10,949,785,289	97.89 %	11,186,076,754	100.00 %	11,186,076,754	100.00 %
RUU	2	2	2	126,091,000	0	0.00 %	0	0.00 %	126,091,000	100.00 %	126,091,000	100.00 %
RUU	2	2	1	10,152,923,000	8,888,365,318	87.54 %	9,981,721,438	98.31 %	10,152,921,366	100.00 %	10,152,921,366	100.00 %
RUU	1	2	2	4,032,746,000	722,918,826	17.93 %	1,633,353,884	40.50 %	2,597,860,826	64.42 %	3,893,229,584	96.54 %
UU	4	4	4	11,388,587,000	2,628,612,960	23.08 %	5,327,561,434	46.78 %	8,798,933,364	77.26 %	11,315,967,080	99.36 %
RUU	3	3	4	7,836,625,000	907,713,882	11.58 %	6,654,170,825	84.91 %	7,801,982,261	99.56 %	7,836,619,380	100.00 %
Rekomendasi	1	1	1	1,204,754,000	580,788,000	48.21 %	944,483,000	78.40 %	1,135,442,000	94.25 %	1,204,754,000	100.00 %
Rekomendasi	1	1	1	940,815,000	148,741,410	15.81 %	498,582,081	52.99 %	856,286,281	91.02 %	940,812,267	100.00 %
UU	5	5	5	8,224,626,000	2,572,383,700	31.28 %	4,846,726,701	58.93 %	6,685,045,337	81.28 %	8,189,923,973	99.58 %
UU	5	3	4	3,091,470,000	710,346,200	22.98 %	1,736,970,800	56.19 %	2,646,878,118	85.62 %	3,090,488,838	99.97 %
UU	5	4	4	5,183,334,000	760,825,890	14.68 %	1,890,941,780	36.48 %	3,609,028,672	69.63 %	5,144,624,241	99.25 %
IHPS	2	2	2	5,187,474,000	760,825,890	14.67 %	2,499,099,600	48.18 %	3,667,303,492	70.70 %	5,149,124,061	99.26 %
Materi	1	1	1	600,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
Rekomendasi	4	4	4	15,903,843,000	9,303,461,294	58.50 %	10,250,252,825	64.45 %	11,805,293,514	74.23 %	15,859,728,479	99.72 %
Materi	2	2	2	1,160,504,000	646,740,092	55.73 %	646,740,092	55.73 %	1,140,494,092	98.28 %	1,160,502,324	100.00 %
Materi	2	2	2	971,324,000	0	0.00 %	636,154,953	65.49 %	738,644,953	76.05 %	963,857,137	99.23 %
Materi	2	2	4	446,797,000	6,168,500	1.38 %	11,268,500	2.52 %	351,733,100	78.72 %	426,683,300	95.50 %
Rekomendasi	4	4	4	5,884,164,000	451,924,000	7.68 %	722,220,000	12.27 %	4,678,493,421	79.51 %	5,807,879,489	98.70 %
Rekomendasi	1	1	1	2,000,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
Rekomendasi	1	1	1	1,002,832,000	30,600,000	3.05 %	31,171,000	3.11 %	832,709,408	83.04 %	996,830,848	99.40 %
Rekomendasi	2	2	2	1,780,753,000	1,091,895,380	61.32 %	1,375,210,380	77.23 %	1,589,137,380	89.24 %	1,780,751,380	100.00 %
Materi	5	5	5	303,825,000	105,374,800	34.68 %	151,823,800	49.97 %	266,134,800	87.59 %	301,790,469	99.33 %
Rekomendasi	3	2	2	541,157,000	0	0.00 %	251,659,000	46.50 %	466,833,500	86.27 %	540,973,500	99.97 %
Rekomendasi	2	2	2	1,291,075,000	410,575,000	31.80 %	1,030,404,265	79.81 %	1,168,157,982	90.48 %	1,286,034,458	99.61 %
Rekomendasi	4	4	4	438,310,000	81,236,000	18.53 %	149,586,000	34.13 %	163,436,000	37.29 %	429,597,000	98.01 %
Materi	5	5	5	813,815,000	332,903,000	40.91 %	435,223,227	53.48 %	611,012,727	75.08 %	807,887,143	99.27 %
Materi	5	5	5	449,243,000	0	0.00 %	381,363,900	84.89 %	435,083,900	96.85 %	448,983,900	99.94 %
Materi	8	12	12	1,240,990,000	146,432,255	11.80 %	434,178,255	34.99 %	994,812,815	80.16 %	1,240,989,475	100.00 %
Materi	8	8	8	1,014,836,000	585,973,040	57.74 %	731,868,180	72.12 %	1,014,835,160	100.00 %	1,014,835,160	100.00 %
Layanan	35	34	34	439,230,994,000	107,591,449,706	24.50 %	195,787,096,963	44.57 %	351,947,076,527	80.13 %	439,157,617,809	99.98 %

34,512,399,031

2,777,582,228

Ultimate Outcome Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional	* Indikator : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%) * Penerjemahan : Tujuan dalam Renstra * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI
---	---

CSF 1 Menyelenggarakan dukungan fungsi legislasi yang profesional	• Indikator : Jumlah Keputusan DPD RI tentang produk legislasi DPD RI (Keputusan) • Penerjemahan : Sasaran strategis (SS) dalam Renstra • Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI
---	---

CSF 1.1 Menyelenggarakan perumusan dan finalisasi produk legislasi	• Indikator : Jumlah produk legislasi yang dihasilkan (Dokumen) • Penerjemahan : Sasaran Program (SP) dalam Renstra • Penanggungjawab : Deputi Persidangan (Eselon I)
--	--

CSF 1.1.1 Menyusun naskah akademik perihal RUU Inisiatif DPD RI	* Indikator : 1) Jumlah naskah akademik perihal RUU Inisiatif DPD * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam * Penanggungjawab : Kepala Biro Persidangan I	CSF 1.1.2 Menyelenggarakan pembahasan materi pandangan/pendapat * Indikator : 1) Jumlah dokumen hasil pembahasan pandangan / pendapat * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam * Penanggungjawab : Kepala Biro Persidangan I dan (Biro Persidangan II)	
---	---	---	--

Uraian CSF 1.1.1 Inventarisasi materi	* Indikator : Jumlah dokumen inventarisasi materi (dokumen) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 1.1.2 Permintaan pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah dan DPD RI * Indikator : Tersusunnya Usul Rancangan Undang-Undang DPD RI (Komite II) (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 1.2.1 Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan
---	--	---	---

Uraian CSF 1.1.2 Studi lapangan/empirik	* Indikator : Jumlah kegiatan studi lapangan (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 1.1.2 Tersedianya Keputusan DPD RI tentang pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU dari Komite II DPD RI * Indikator : Penyusunan Hasil Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	
---	---	--	--

Uraian CSF 1.1.3 Peer Review/ Telaah Sejawat (teknokratik)	* Indikator : Jumlah dokumen telaah sejawat (dokumen) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 1.1.2 Tersedianya Keputusan DPD RI tentang Rancangan Undang-undang dari Komite IV DPD RI * Indikator : Jumlah RUU Usul Tugas Komite IV DPD RI (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	
--	---	---	--

Uraian CSF 1.1.4 Studi referensi	* Indikator : Jumlah kegiatan studi referensi (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 1.1.2 Terlaksananya pembahasan UU Usul DPR dan Pemerintah * Indikator : /Terselenggaranya Kegiatan RUU Tertentu Hasil Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	
--	--	--	--

Uraian CSF 1.1.5 Uji Sahih	* Indikator : Jumlah kegiatan uji sahih (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III		
--	--	--	--

	* Indikator : Terselenggaranya Penyusunan Rancangan UndangUndang Usul dari Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2021 Lingkup Tugas Komite III (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III		
--	---	--	--

Uraian CSF 1.1.1 Tersedianya Keputusan DPD RI tentang pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu dari Komite I	* Indikator : Terselenggaranya kegiatan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU tertentu yang Berkaitan dengan Ruang Lingkup Tugas Komite I DPD RI. (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III		
--	--	--	--

Uraian CSF 1.1.1 Tersedianya Keputusan DPD RI tentang Rancangan Undang-undang dari Komite I DPD RI	* Indikator : Terselenggaranya kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Ruang Lingkup Tugas Komite I. (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III		
--	---	--	--

Uraian CSF 1.1.1 Terlaksananya harmonisasi legislasi pusat dan daerah	* Indikator : Tersusunnya Pendapat dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah. (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III		
---	--	--	--

Uraian CSF 1.1.1 Terlaksananya pembahasan UU Usul DPR dan Pemerintah	* Indikator : Terselenggaranya Pembahasan Bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Biro Persidangan I (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III		
--	---	--	--

	<table><tr><th>Ultimate Outcome</th></tr><tr><td>Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional</td></tr></table>	Ultimate Outcome	Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional	* Indikator : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%) * Penerjemahan : Tujuan dalam Renstra * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI		
Ultimate Outcome						
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional						
	<table><tr><th>CSF 2</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional</td></tr></table>	CSF 2	Menyelenggarakan dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional	* Indikator : Jumlah Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (Keputusan) * Penerjemahan : Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPD RI * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI		
CSF 2						
Menyelenggarakan dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional						
	<table><tr><th>CSF 2.1</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan perumusan dan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkualitas</td></tr></table>	CSF 2.1	Menyelenggarakan perumusan dan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkualitas	* Indikator : Jumlah rumusan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan (Dokumen) * Penerjemahan : Sasaran Program (SP) dalam Renstra * Penanggungjawab : Deputi Persidangan (Eselon I)		
CSF 2.1						
Menyelenggarakan perumusan dan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkualitas						
<table><tr><th>CSF 2.1.1</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan pengolahan data hasil pengawasan atas pelaksanaan UU</td></tr></table>	CSF 2.1.1	Menyelenggarakan pengolahan data hasil pengawasan atas pelaksanaan UU	* Indikator : Jumlah pengolahan data hasil pengawasan pelaksanaan Undang Undang (Dokumen) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Persidangan I (Eselon II)	<table><tr><th>CSF 2.1.2</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan dukungan pengawasan pelaksanaan undang undang lingkup Biro Persidangan II</td></tr></table> * Indikator : Rasio total draft Hasil Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II (%) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Persidangan II (Eselon II)	CSF 2.1.2	Menyelenggarakan dukungan pengawasan pelaksanaan undang undang lingkup Biro Persidangan II
CSF 2.1.1						
Menyelenggarakan pengolahan data hasil pengawasan atas pelaksanaan UU						
CSF 2.1.2						
Menyelenggarakan dukungan pengawasan pelaksanaan undang undang lingkup Biro Persidangan II						
<table><tr><th>Uraian CSF 2.1.1 A</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan kunjungan kerja terkait pengawasan atas pelaksanaan UU</td></tr></table>	Uraian CSF 2.1.1 A	Menyelenggarakan kunjungan kerja terkait pengawasan atas pelaksanaan UU	* Indikator : Jumlah kegiatan kunjungan kerja terkait pengawasan atas pelaksanaan UU (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 2.1.2</th></tr><tr><td>Tersedianya Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Komite II DPD RI</td></tr></table> * Indikator : Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Tertentu (Komite II) (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 2.1.2	Tersedianya Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Komite II DPD RI
Uraian CSF 2.1.1 A						
Menyelenggarakan kunjungan kerja terkait pengawasan atas pelaksanaan UU						
Uraian CSF 2.1.2						
Tersedianya Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Komite II DPD RI						
<table><tr><th>Uraian CSF 2.1.1 B</th></tr><tr><td>Menyediakan daftar inventarisasi masalah terkait pengawasan atas pelaksanaan UU</td></tr></table>	Uraian CSF 2.1.1 B	Menyediakan daftar inventarisasi masalah terkait pengawasan atas pelaksanaan UU	* Indikator : Jumlah laporan daftar inventarisasi masalah terkait pengawasan atas pelaksanaan UU (dokumen) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 2.1.2</th></tr><tr><td>Tersedianya Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Komite IV DPD RI</td></tr></table> * Indikator : Terselenggaranya Kegiatan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu Bidang Komite IV (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 2.1.2	Tersedianya Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Komite IV DPD RI
Uraian CSF 2.1.1 B						
Menyediakan daftar inventarisasi masalah terkait pengawasan atas pelaksanaan UU						
Uraian CSF 2.1.2						
Tersedianya Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Komite IV DPD RI						
<table><tr><th>Uraian CSF 2.1.1</th></tr><tr><td></td></tr></table>	Uraian CSF 2.1.1		* Indikator : Terselenggaranya Advokasi dan Resolusi Permasalahan Daerah (Komite I) (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III			
Uraian CSF 2.1.1						
<table><tr><th>Uraian CSF 2.1.1</th></tr><tr><td>Terlaksananya kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite III</td></tr></table>	Uraian CSF 2.1.1	Terlaksananya kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite III	* Indikator : Jumlah rekomendasi kepada Mitra Kerja lingkup tugas komite III (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III			
Uraian CSF 2.1.1						
Terlaksananya kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra kerja lingkup tugas Komite III						

<table><tr><th>Ultimate Outcome</th></tr><tr><td>Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional</td></tr></table>		Ultimate Outcome	Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional	* Indikator : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%) * Penerjemahan : Tujuan dalam Renstra * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI			
Ultimate Outcome							
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional							
<table><tr><th>CSF 3</th></tr><tr><td>Meningkatkan kualitas dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya</td></tr></table>		CSF 3	Meningkatkan kualitas dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	* Indikator : Jumlah pertimbangan atas RUU APBN dan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara yang diputuskan dalam Sidang Paripurna (Putusan) * Indikator : Jumlah peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna (Putusan) * Penerjemahan : Sasaran strategis (SS) dalam Renstra * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI			
CSF 3							
Meningkatkan kualitas dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya							
<table><tr><th>CSF 3.1</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan dukungan fungsi pertimbangan atas anggaran dan rekomendasi</td></tr></table>		CSF 3.1	Menyelenggarakan dukungan fungsi pertimbangan atas anggaran dan rekomendasi	* Indikator : Jumlah pertimbangan atas RUU APBN dan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna (Dokumen) * Indikator : Jumlah peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan (Dokumen) * Penerjemahan : Sasaran Program (SP) dalam Renstra * Penanggungjawab : Deputi Persidangan (Eselon I)			
CSF 3.1							
Menyelenggarakan dukungan fungsi pertimbangan atas anggaran dan rekomendasi							
<table><tr><th>CSF 3.1.1</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan pengolahan data fungsi pertimbangan atas Anggaran</td></tr></table>	CSF 3.1.1	Menyelenggarakan pengolahan data fungsi pertimbangan atas Anggaran	* Indikator : Jumlah pengolahan data atas pertimbangan anggaran dan hasil pemeriksaan BPK (Kegiatan) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Persidangan I dan II (Eselon (Biro Persidangan II))	<table><tr><th>CSF 3.1.2</th></tr><tr><td>Menyelenggarakan pengolahan data fungsi pertimbangan atas Rekomendasi DPD RI</td></tr></table>	CSF 3.1.2	Menyelenggarakan pengolahan data fungsi pertimbangan atas Rekomendasi DPD RI	* Indikator : Jumlah pengolahan data atas pertimbangan rekomendasi (Kegiatan) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Persidangan I dan II (Eselon
CSF 3.1.1							
Menyelenggarakan pengolahan data fungsi pertimbangan atas Anggaran							
CSF 3.1.2							
Menyelenggarakan pengolahan data fungsi pertimbangan atas Rekomendasi DPD RI							
<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.1 A</th></tr><tr><td>inventarisasi topik Pertimbangan anggaran</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.1 A	inventarisasi topik Pertimbangan anggaran	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik pertimbangan anggaran (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 A</th></tr><tr><td>Invetarisasi topik Pertimbangan DPD RI Atas Calon Anggota BPK</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 A	Invetarisasi topik Pertimbangan DPD RI Atas Calon Anggota BPK	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik pertimbangan atas calon anggota BPK (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III
Uraian CSF 3.1.1 A							
inventarisasi topik Pertimbangan anggaran							
Uraian CSF 3.1.2 A							
Invetarisasi topik Pertimbangan DPD RI Atas Calon Anggota BPK							
<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.1 B</th></tr><tr><td>inventarisasi topik Pertimbangan hasil pemeriksaan BPK</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.1 B	inventarisasi topik Pertimbangan hasil pemeriksaan BPK	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik pertimbangan hasil Pemeriksaan BPK (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 B</th></tr><tr><td>Invetarisasi topik tentang Pengelolaan Keuangan Internal DPD RI</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 B	Invetarisasi topik tentang Pengelolaan Keuangan Internal DPD RI	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik pengelolaan keuangan internal DPD RI (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III
Uraian CSF 3.1.1 B							
inventarisasi topik Pertimbangan hasil pemeriksaan BPK							
Uraian CSF 3.1.2 B							
Invetarisasi topik tentang Pengelolaan Keuangan Internal DPD RI							
<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 C</th></tr><tr><td>Invetarisasi topik Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 C	Invetarisasi topik Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 D</th></tr><tr><td>Inventarisasi topik atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang Disampaikan Pemda</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 D	Inventarisasi topik atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang Disampaikan Pemda	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan pemda (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III
Uraian CSF 3.1.2 C							
Invetarisasi topik Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah							
Uraian CSF 3.1.2 D							
Inventarisasi topik atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang Disampaikan Pemda							
<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 E</th></tr><tr><td>Inventarisasi topik Kebijakan Non RUU/ UU terkait Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 E	Inventarisasi topik Kebijakan Non RUU/ UU terkait Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi topik kebijakan non RUU/ UU terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 F</th></tr><tr><td>Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 F	Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda	* Indikator : Jumlah kegiatan monev tindak lanjut atas rencana aksi Rancangan Perda dan Perda (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III
Uraian CSF 3.1.2 E							
Inventarisasi topik Kebijakan Non RUU/ UU terkait Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan							
Uraian CSF 3.1.2 F							
Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda							
<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 G</th></tr><tr><td>Inventarisasi topik Pendapat dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 G	Inventarisasi topik Pendapat dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah	* Indikator : Jumlah kegiatan inventarisasi pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 3.1.2 H</th></tr><tr><td>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Daerah</td></tr></table>	Uraian CSF 3.1.2 H	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Daerah	* Indikator : Jumlah kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan daerah (Kegiatan) * Penerjemahan : Output UKE II * Penanggungjawab : UKE III
Uraian CSF 3.1.2 G							
Inventarisasi topik Pendapat dan Pertimbangan Atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah							
Uraian CSF 3.1.2 H							
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Daerah							

Uraian CSF 1.1.1; Uraian CSF 2.1.1 B

Ultimate Outcome
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional

- * **Indikator** : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%)
- * **Penerjemahan** : Tujuan dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal DPD RI

CSF 5
Menyelenggarakan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah

- * **Indikator** : Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat
- * **Penerjemahan** : Sasaran strategis (SS) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal DPD RI

CSF 5.1
Mengelola aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal

- * **Indikator** : Jumlah pengelolaan data aspirasi masyarakat dan daerah (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Program (SP) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Deputi Persidangan (Eselon I)

CSF 5.1.1
Mengolah data aspirasi masyarakat dan daerah yang berasal dari kegiatan reses, kunjungan kerja daerah pemilihan dan pengaduan masyarakat

- * **Indikator** : Jumlah data yang dihasilkan dari hasil pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah (Kegiatan)
 - * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra
 - * **Penanggungjawab** : Kepala Biro Persidangan I dan II (Eselon II)
- (puskadaran)

Uraian CSF 5.1.1
* Tersedianya tabulasi data pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

- * **Indikator** : Tabulasi hasil pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II
- * **Penanggungjawab** : UKE III

Uraian CSF 5.1.1
* Terlaksananya dukungan substansi terhadap tugas dan fungsi alat kelengkapan

- * **Indikator** : Terselenggaranya Kegiatan Seminar Nasional (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II
- * **Penanggungjawab** : UKE III

Ultimate Outcome
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional

- **Indikator** : Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat DPD RI (Kegiatan)
- **Penerjemahan** : Sasaran Program (SP) dalam Renstra
- **Penanggungjawab** : Deputi Persidangan (Eselon I)

CSF 7
Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPRD RI yang efektif dan efisien

CSF 7.1
Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan

CSF 7.1.1
Menyelenggarakan dukungan persidangan DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan

- CSF 7.1.2**
Menyelenggarakan dukungan sidang dan rapat
DPD RI yang Efektif di Lingkup Biro Persidangan II

- CSF 7.1.3**
Menyelenggarakan dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Persidangan I

- * **Indikator** : Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan I (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Kepala Biro Persidangan I (Eselon II)

Uraian CSF 7.1.1
Terlaksananya pertemuan dan konsultasi

- Uraian CSF 7.1.2**
- Terlaksananya persidangan dan penyiapan materi dalam lingkup Biro Persidangan II

- Uraian CSF 7.1.2**
- Terlaksananya persidangan dan penyiapan materi dalam lingkup Biro Persidangan I

- * **Indikator** : Tersedianya Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan I (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II
- * **Penanggungjawab** : UKE III

Ultimate Outcome
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional

- * **Indikator** : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%)
- * **Penerjemahan** : Tujuan dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal DPD RI

CSF 8
Terbentuknya citra positif DPD RI

- * **Indikator** : Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI
- * **Penerjemahan** : Sasaran strategis (SS) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal DPD RI

CSF 8.1
Terbentuknya citra positif DPD RI

- * **Indikator** : Rasio Pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Program (SP) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Deputi Administrasi (Eselon I)

CSF 8.1.1
Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI

- * **Indikator** : Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Kepala Protokol, Humas dan Media (Eselon II)

Uraian CSF 8.1.1
* Tersedianya layanan hubungan masyarakat dan informasi

- * **Indikator** : Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II
- * **Penanggungjawab** : UKE III

[illegible]

	<table><tr><th>Ultimate Outcome</th></tr><tr><td>Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional</td></tr></table>	Ultimate Outcome	Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional	* Indikator : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%) * Penerjemahan : Tujuan dalam Renstra * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI					
Ultimate Outcome									
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional									
	<table><tr><th>CSF 10</th></tr><tr><td>Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI</td></tr></table>	CSF 10	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI	* Indikator : Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI * Penerjemahan : Sasaran strategis (SS) dalam Renstra * Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal DPD RI					
CSF 10									
Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI									
	<table><tr><th>CSF 10.1</th></tr><tr><td>Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Administrasi</td></tr></table>	CSF 10.1	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Administrasi	* Indikator : 1) Nilai manajemen perubahan; 2) Nilai penataan peraturan perundang undangan; 3) Nilai Penataan dan penguatan organisasi; 4) Nilai Penataan Tata laksana; 5) Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM (Kegiatan) * Penerjemahan : Sasaran Program (SP) dalam Renstra * Penanggungjawab : Deputi Administrasi (Eselon I)					
CSF 10.1									
Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Administrasi									
<table><tr><th>CSF 10.1.1</th></tr><tr><td>Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan berbasis TIK</td></tr></table>	CSF 10.1.1	Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan berbasis TIK	* Indikator : Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Kegiatan) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi (Eselon II)	<table><tr><th>CSF 10.1.2</th></tr><tr><td>Meningkatnya pelaksanaan kriteria pengungkit reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI</td></tr></table> * Indikator : 1) Nilai manajemen perubahan; 2) Nilai penataan peraturan perundang undangan; 3) Nilai Penataan dan penguatan organisasi; 4) Nilai Penataan Tata laksana; 5) Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM (Kegiatan) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon II)	CSF 10.1.2	Meningkatnya pelaksanaan kriteria pengungkit reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI	<table><tr><th>CSF 10.1.3</th></tr><tr><td>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan DPD RI</td></tr></table> * Indikator : Nilai Hasil Audit Kearsipan (Kegiatan) * Penerjemahan : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra * Penanggungjawab : Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi (Eselon II)	CSF 10.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan DPD RI
CSF 10.1.1									
Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan berbasis TIK									
CSF 10.1.2									
Meningkatnya pelaksanaan kriteria pengungkit reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI									
CSF 10.1.3									
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan DPD RI									
<table><tr><th>Uraian CSF 10.1.1</th></tr><tr><td>Layanan Data dan Informasi</td></tr></table>	Uraian CSF 10.1.1	Layanan Data dan Informasi	* Indikator : Jumlah Layanan Data dan Informasi (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	<table><tr><th>Uraian CSF 10.1.3</th></tr><tr><td>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</td></tr></table> * Indikator : Jumlah Kegiatan Layanan Kearsipan (Kegiatan) * Penerjemahan : Output Unit Kerja Eselon (UKE) II * Penanggungjawab : UKE III	Uraian CSF 10.1.3	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			
Uraian CSF 10.1.1									
Layanan Data dan Informasi									
Uraian CSF 10.1.3									
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan									

Ultimate Outcome
Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional

- * **Indikator** : Tingkat dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional (%)
- * **Penerjemahan** : Tujuan dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal DPD RI

CSF 11
Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI

- * **Indikator** : Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI
- * **Penerjemahan** : Sasaran strategis (SS) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal DPD RI

CSF 11.1
Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Deputy Bidang Administrasi

- * **Indikator** : Rasio Rencana aksi RB lingkup Deputy Administrasi yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Deputy Administrasi
- * **Penerjemahan** : Sasaran Program (SP) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Deputy Administrasi (Eselon I)

CSF 11.1.1
Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum

- * **Indikator** : Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam
- * **Penanggungjawab** : Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon II)

CSF 11.1.2
Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan

- * **Indikator** :Rasio Rencana Aksi RB lingkup biro Perencanaan dan Keuangan yang Terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Eselon II)

Uraian CSF 11.1.1
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- * **Indikator** : Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam
- * **Penanggungjawab** : Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon II)

(Bagian2 di Ortala)

Uraian CSF 11.1.2
Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- * **Indikator** : Jumlah dokumen pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran (Kegiatan)
- * **Penerjemahan** : Sasaran Kegiatan (SK) dalam Renstra
- * **Penanggungjawab** : Kepala Biro Persidangan I dan II (Eselon II)

(Bagian Perencanaan)